

Pengelolaan Bumdes Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

Fitri Rahayu¹ Nurmasari²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution

No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

fitrirahayus@student.uir.ac.id, nurmasari@soc.ac.id

Abstract

The establishment of BUMDes in Puo Raya Village aims to improve the village economy, optimize village assets to be useful for village welfare, improve community efforts in managing village economic potential and create opportunities and market networks that support the needs of public services for residents. The purpose of this study was to analyze and determine the management of BUMDes Tunas Harapan Jaya Puo Raya Village, Tandun District, Rokan Hulu Regency and its inhibiting factors. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observations and documentation. The informants in this study were the Head of Puo Raya Village, Head of Bumdes, Head of PUBJ Unit, Shop Employees and the Community of Puo Raya Village. The results of the study can be concluded that the Management of the Village-Owned Enterprise Tunas Harapan Jaya, Puo Raya Village is still not optimally implemented because many incomplete goods are sold and there are still people who do not want to cooperate in the management of Bumdes Tunas Harapan Jaya. There are still inhibiting factors found in the management of the Village-Owned Enterprise Tunas Harapan Jaya, Puo Raya Village, namely the lack of funds which is one of the major causes. Because the existence of Bumdes in implementing programs and businesses cannot be separated from the budget they have, as a business institution, the existence of business capital is one of the pulses for life and development.

Keywords: Management, Program, Saprotani

Abstrak

Pendirian BUMDes di Desa Puo Raya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa serta menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Namun dalam pelaksanaannya khususnya program saprotani belum terlaksana secara optimal, masih ditemukannya pelaksanaan program ini sehingga banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk berbelanja kebutuhan saprotani di bumdes ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan BUMDes Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Puo Raya, Kepala Bumdes, Kepala Unit PUBJ, Karyawan Toko dan Masyarakat Desa Puo Raya. Hasil penelitian dapat disimpulkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya masih belum maksimal dijalankan karena banyak barang-barang yang tidak lengkap dijual serta masih ada masyarakat yang tidak mau ikut kerja sama dalam pengelolaan Bumdes Tunas Harapan Jaya. Masih adanya ditemukan faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya yakni kekurangan dana yang menjadi salah satu penyebab besarnya. Karena keberadaan Bumdes dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki, sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang.

Kata Kunci : Pengelolaan, Program, Saprotani

Pendahuluan

Pengelolaan merupakan suatu proses yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes dibentuk sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa, yang dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Dengan kehadiran BUMDes pemerintah desa beserta masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa beserta masyarakat dapat membuat program-program yang sesuai dengan potensi-potensi desa tersebut.

Pendirian BUMDes di Desa Pulo Raya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Sejarah berdirinya Bumdes di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2016 melalui musyawarah Pembentukan Bumdes yang diadakan pada tanggal 13 Oktober telah didirikan suatu perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sejahtera Desa Pulo Raya. Berdasarkan hal

tersebut di atas para penghadap telah diangkat sebagai para pengurus dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dalam pasal 1 tahun 2016 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan Bumdes adalah suatu lembaga/Badan Perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, yang dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Jenis usaha Bumdes di atas, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tunas Harapan Jaya di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu telah menjalankan kegiatan usaha seperti dibawah ini :

1. Keuangan atau Banking, menjalankan usaha simpan pinjaman bagi anggota petani atau yang terdaftar di bumdes, yang mana pengelolaannya diketuai oleh Kepala Unit Simpin.
2. Perdagangan
 - a. Program unit saprotan tani, menjalankan kegiatan yang bergerak dalam bidang penyediaan sarana produksi pertanian terutama pupuk, pakan ternak dan kebutuhan peternakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan para petani.
 - b. Program toko bangunan, menjalankan usaha jual beli berbagai macam bahan-bahan bangunan untuk kebutuhan pembangunan di desa.
 - c. Program BRILink, menjalankan usaha jasa seperti menyetor dan menarik uang melalui program BRILink agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang kebank. Program ini dikelola oleh staf keuangan bumdes.
3. Kredit barang, menjalankan usaha kredit barang baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan pertanian.
4. Peternakan
 - a. Peternakan kandang ayam, menjalankan usaha penyewaan kandang ayam dan pemeliharaan ayam.

Berikut dapat dilihat hasil pencapaian dana yang diperoleh dari masing-masing program yang dijalankan oleh Bumdes Tunas Harapan Jaya di Desa Puo Raya :

Tabel 1.. Pencapaian Dana yang Diperoleh Dari Masing-Masing Program Yang Dijalankan oleh Bumdes Tunas Harapan Jaya di Desa Puo Raya

No.	Tahun	Target Pemasukan	Realisasi Pemasukan
Program Keuangan atau Banking			
1.	2021	Rp. 500.000.000	Rp. 391.662.000
2.	2022	Rp. 500.000.000	Rp. 352.334.550
3.	2023	Rp. 500.000.000	Rp. 442.021.500

Program unit saprotan tani			
1.	2021	Rp. 50.000.000	Rp. 26.592.600
2.	2022	Rp. 50.000.000	Rp. 31.639.250
3.	2023	Rp. 50.000.000	Rp. 19.352.500
Program toko bangunan			
1.	2021	Rp. 200.000.000	Rp. 189.562.000
2.	2022	Rp. 200.000.000	Rp. 216.367.500
3.	2023	Rp. 200.000.000	Rp. 164.681.000
Program BRILink			
1.	2021	Rp. 100.000.000	Rp. 98.850.000
2.	2022	Rp. 100.000.000	Rp. 114.035.000
3.	2023	Rp. 100.000.000	Rp. 106.045.000
Program Kredit barang			
1.	2021	Rp. 100.000.000	Rp. 86.241.600
2.	2022	Rp. 100.000.000	Rp. 69.014.500
3.	2023	Rp. 100.000.000	Rp. 91.457.850
Program Peternakan kandang ayam			
1.	2021	Rp. 48.000.000	Rp. 32.683.310
2.	2022	Rp. 50.000.000	Rp. 43.687.560
3.	2023	Rp. 50.000.000	Rp. 48.943.300

Sumber : Bumdes Tunas Harapan Jaya di Desa Puo Raya, 2024

Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas satu unit usaha saja yaitu Program unit saprotan tani atau Sarana Produksi Pertanian, menjalankan kegiatan yang bergerak dalam bidang penyediaan sarana produksi pertanian terutama pupuk, pakan ternak dan kebutuhan peternakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan para petani khususnya di sekitar wilayah Desa Puo Raya.

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah uang masuk dari hasil penjualan pada program saprotani di Bumdes Tunas Harapan Jaya di Desa Puo Raya selama 3 tahun terakhir lebih banyak mengalami penurunan dimana diketahui dari menurunnya minat masyarakat desa untuk membeli barang atau kebutuhan pertanian di Bumdes tersebut. Hal lain dalam pelaksanaan program saprotan tani ini juga tidak berjalan dengan lancar dengan ditemukannya fenomena sebagai berikut : Banyaknya jumlah masyarakat Desa Puo Raya yaitu sebanyak 3.272 orang namun kurangnya minat beli masyarakat Desa Puo Raya yang membeli pakan ternak dan kebutuhan ternak lainnya ke Bumdes Tunas Harapan Raya karena jenis pakan ternak yang dijual tidak lengkap bahkan ada yang sudah kadaluarsa sehingga banyak masyarakat yang membeli kebutuhan pakan ternak dan kebutuhan pertanian di luar

desa yang lebih lengkap produk yang dijualnya. Kurang tanggapnya pihak Bumdes Tunas Harapan Raya untuk lebih banyak menyediakan dan memperjualbelikan kebutuhan pakan ternak sehingga minat beli masyarakat desa akan lebih meningkat dan program Bumdes akan semakin berjalan.

Bumdes diharapkan mampu menyokong pembangunan ekonomi berbasis potensi tempatan, sehingga makin mendekatkan pelayanan dan memanfaatkan potensi alam desa. Ini berguna untuk menunjang ekonomi tempatan dan membangun pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana energi, pengangkutan dan komunikasi dan lainnya (Pradani, 2020). Kemudian mempersiapkan sumber daya manusia pengelola Bumdes agar lebih optimal dalam mengembangkan Bumdes melalui pelatihan manajemen SDM dan pembuatan peta jalan bisnis.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Menurut Siagian (2018:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi diatas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsure-unsur tertentu yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2012: 37) adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penetapan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lain.

Konsep Organisasi Publik

Menurut Siagian (2018:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Gibson, et. Al (2012:6) mendefinisikan "organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri".

Menurut Robbin (2018:4) "organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan".

Konsep Manajemen Publik

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2016:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2018:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2014:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep Desa

Widjaja (2003:3) Desa merupakan bagian dari pemerintahan terendah yang berada dibawah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dapat ditarik kesimpulan Desa merupakan masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya menurut Soemantri (2011:7) pemerintah Desa yaitu yang terdiri dari Kepala Desa yang memiliki kekuasaan tertinggi dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa ini terdiri dari sekretaris dan perangkat lainnya. Sekretaris desa dalam melaksanakan teknis dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut.

Konsep Pengelolaan

Menurut Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2009 : 9)

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2009:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Menurut Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Konsep BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Secara umum BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dan penguatan perekonomian desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Theresia (2008) dalam Alfian Noer Ilham, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa yang memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan agar terjalinnya hubungan sosial antar masyarakat yang berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang ada diperdesaan memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi yang lainnya. Hal tersebut dimaksudkan dengan adanya keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan warga desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Muryani (dalam Ilham 2008) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan hasil seperti laba atau keuntungan.

Metode

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan maupun juga tulisan, dan tingkah laku yang dilakukan dan diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2011:166). Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang mana menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun juga tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini sangat sesuai dengan untuk diterapkan apabila penelitian tersebut bertujuan untuk memahami apakah makna yang mendasari tingkah laku pada manusia. Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan apabila peneliti ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan (Suyanto dan Sutinah, 2011 : 174), dan sedangkan penelitian dekriptif merupakan penelitian yang melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah-masalah dan unit yang diteliti oleh peneliti. (Faisal, 2010:20).

Penelitian ini berlokasi di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan adanya indikasi bahwa tujuan dari program Badan Usaha Milik Desa ini belum tercapai atau belum terealisasi secara keseluruhan. Dan penulis memilih meneliti disini agar dapat mempermudah penulis dalam

memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian dan juga menjadi salah satu tempat yang pelaksanaan kebijakannya.

Informan adalah merupakan orang-orang yang mana dapat memberikan informasi kepada peneliti walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Key Informan adalah merupakan orang-orang yang mengetahui dan juga memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan di dalam penelitian. Key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pulo Raya, Kepala Bumdes, Kepala Unit PUBJ, Karyawan Toko dan Masyarakat Desa Pulo Raya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tentu hal tersebut sangat dibutuhkan agar pengelolaan BUMDES dapat berjalan dengan baik dan supaya pengelolaan dari BUMDES bisa terhindar dari penyimpangan atau kesalahan yang tidak diinginkan. Adapun informasi yang didapatkan oleh penulis dan diolah menjadi informasi yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah upaya yang dilakukan oleh BUMDes Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya agar perencanaannya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk indikator Perencanaan ini sendiri diajukan tiga item penilaian untuk menilai Perencanaan dari penerapan Pengelolaan BUMDes Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya. Adapun tiga item penilaian yang dinilai yaitu Pelaksanaan musyawarah desa, BUMDes membuat perencanaan dalam pengelolaan potensi desa, dan Meningkatkan perekonomian desa.

Pengelolaan BUMDES harus dilakukan dengan baik agar BUMDES di masyarakat dapat berkembang, salah satunya adalah kegiatan menyusun rencana usaha (*businessplan*), yakni Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Perencanaan, peneliti melihat bahwa perencanaan yang dibuat oleh pengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya khususnya pada program saprotani belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat tidak ada kegiatan penyusunan laporan atau pengelolaan barang atau produk saprotani yang tersedia di bumdes. Oleh karena itu sampai saat sekarang ini masih banyak barang-barang saprotani yang tidak layak jual masih dipajang. Seharusnya pihak bumdes melakukan pemeriksaan ulang terkait barang saprotani yang dijual dan diganti dengan yang baru agar masyarakat selalu tertarik untuk berbelanja di bumdes.

Namun dalam perencanaan tersebut juga ditemukan hambatan seperti masalah regulasi dalam pembentukan BUMDes itu sendiri, kemudian masalah manajemen dalam pengelolaan BUMDes Tunas Harapan Jaya, karena pengetahuan petugas BUMDes dalam pengelolaan manajemen BUMDes masih kurang, sehingga petugas BUMDes perlu diadakan

pelatihan mengenai pengelolaan BUMDes yang baik. Selain itu juga banyak masyarakat yang mengeluh karena pada saat masyarakat ingin belanja, BUMDes sering tutup pada jam-jam tertentu. Akan tetapi masyarakat juga mengapresiasi kinerja pengurus BUMDes, karena pelayanannya ramah.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber yang sudah ditetapkan oleh BUMDes Tunas Harapan Jaya. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu BUMDes didirikan berdasarkan peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, BUMDes menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), dan BUMDes menyusun struktur organisasi.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator pengorganisasian, peneliti melihat bahwa pengorganisasian yang dibuat oleh pengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya dalam program saprotani belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari struktur organisasi BUMDes Tunas Harapan Jaya yang telah dibuat secara jelas, yaitu dengan berdasarkan Peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa, serta musyawarah desa dengan masyarakat namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan saprotani ini sebaiknya direncanakan dan dijalankan bersama namun tidak semua pihak yang terlibat dalam bumdes yang mau menjalankan program saprotani dengan baik.

Kemudian mengenai pembagian kerja, setiap jabatan dalam BUMDes memiliki tupoksi masing-masing dan harus dijalankan sebagai mana mestinya. Adapun yang menjadi wewenang semua pengurus adalah diharuskan memajukan usaha BUMDes Saprotani. Meskipun demikian, kinerja seluruh anggota BUMDes harus dapat meningkatkan kinerjanya dan mengevaluasi apa yang masih kurang, agar masyarakat merasa puas terhadap keberadaan BUMDes Tunas Harapan Jaya dalam bentuk usaha saprotani.

Jadi, indikator pengorganisasian merupakan suatu penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber yang 91 sudah ditetapkan oleh BUMDes Tunas Harapan Jaya. Struktur organisasi BUMDes Tunas Harapan Jaya telah dibuat secara jelas, yaitu dengan berdasarkan Peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa, serta musyawarah desa dengan masyarakat. Selain itu juga melibatkan notaris sebagai pelegalisasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta pendirian BUMDes. Kemudian mengenai pembagian kerja, setiap jabatan dalam BUMDes memiliki tupoksi masing-masing dan harus dijalankan sebagai mana mestinya.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah suatu langkah atau bentuk manajerial guna untuk mengarahkan seluruh pihak yang terlibat dalam mengurus dan mengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya

agar bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu BUMDes membuka unit usaha sesuai dengan potensi desa, BUMDes menjalankan usaha untuk melayani kebutuhan masyarakat, dan adanya semangat untuk berusaha.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator pengarahan, peneliti melihat bahwa pengarahan yang dibuat oleh BUMDes Tunas Harapan Jaya dalam program saprotani belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pergerakan Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes yang kurang memberikan arahan dan masukan, baik dalam segi pengelolaan, pengembangan mitra kerja, dan segi mencari laba sehingga kegiatan saprotani tidak berjalan dengan baik.

Permasalahan lain terkait pelaksanaan kegiatan saprotani sekarang BUMDes sendiri belum dapat membalikkan modal yang telah dikeluarkan karena hasil penjualan produk saprotani tidak berjalan dengan lancar. Selain itu juga bahan atau barang yang dijual di BUMDes masih tergolong sedikit, terutama untuk jenis pupuk serta bibit yang dijual. Masyarakat sangat menyayangkan akan hal ini, Karena mereka menilai bahan yang dijual di BUMDes masih minim, karena barang yang mereka cari banyak yang tidak ada atau kosong.

Kemudian mengenai penyerahan laporan, pengurus BUMDes rutin menyerahkan laporan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes Tunas Harapan Jaya. Yang kemudian di evaluasi secara bersama-sama untuk memperbaiki apa yang belum baik dan menambah apa yang masih kurang. Agar kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes menjadi semakin tinggi dan lebih baik.

Jadi, indikator pengarahan merupakan suatu langkah atau bentuk manajerial guna untuk mengarahkan seluruh pihak yang terlibat dalam mengurus dan mengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya agar bisa bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes selalu memberikan arahan dan masukan, baik dalam segi pengelolaan, pengembangan mitra kerja, dan segi mencari laba. Namun sampai hari ini BUMDes belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD. Kemudian sampai sekarang BUMDes sendiri belum dapat membalikkan modal yang telah dikeluarkan. Selain itu juga bahan atau barang yang dijual di BUMDes masih tergolong sedikit, terutama untuk kebutuhan saprotani seperti pupuk, bibit dan kebutuhan lainnya. Masyarakat sangat menyayangkan akan hal ini, karena mereka menilai bahan yang dijual di BUMDes masih minim, karena barang yang mereka cari banyak yang tidak ada atau kosong.

d. Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian adalah suatu bentuk yang telah direncanakan oleh komisaris atau Kepala Desa terhadap pengurus dan pengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya dengan tujuan untuk mencapai suatu target yang ingin dicapai berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Pengurus BUMDes menyerahkan laporan, Pengawasan oleh Pemerintah desa, dan Menyelenggarakan rapat umum.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indicator Pengendalian, peneliti melihat bahwa pengendalian yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya sudah cukup baik. Pengurus BUMDes selalu mengadakan rapat minimal dua kali dalam setahun. Khususnya dalam kondisi yang memang dianggap perlu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait kemajuan BUMDes.

Dalam musyawarah, pengurus dan Pembina selalu melibatkan perwakilan dari masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi mis komunikasi antara pengurus BUMDes, Pembina dan masyarakat. Selain itu transparan sipengelolaan BUMDes juga selalu diutamakan. Yakni dengan menyampaikan laporan kepada Komisarisi atau kepala desa, yang kemudian di tempelkan di papan pengumuman Kantor Kepala Desa.

Jadi indikator pengendalian merupakan suatu bentuk yang telah direncanakan oleh komisarisi atau Kepala Desa terhadap pengurus dan pengelola BUMDes Tunas Harapan Jaya dengan tujuan untuk mencapai suatu target yang ingin dicapai berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya. Pengurus BUMDes selalu mengadakan rapat minimal dua kali dalam setahun. Khususnya dalam kondisi yang memang dianggap perlu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait kemajuan BUMDes.

Dalam musyawarah, pengurus dan Pembina selalu melibatkan perwakilan dari masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita dan tokoh pemuda. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi mis komunikasi antara pengurus BUMDes, Pembina dan masyarakat. Selain itu transparan sipengelolaan BUMDes juga selalu diutamakan. Yakni dengan menyampaikan laporan kepada Komisarisi atau kepala desa, yang kemudian di tempelkan di papan pengumuman Kantor Kepala Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis dilapangan terhadap pengelolaan program saprotani pada BUMDes Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, secara keseluruhan belum terkelola secara optimal. Program saprotani pada BUMDes Tunas Harapan Jaya ini belum dikelola semaksimal mungkin oleh pengurus, Pembina, dan pihak lain yang terkait dengan BUMDes, padahal program ini jika dikelola dengan baik maka akan mendapatkan banyak keuntungan karena hampir secara keseluruhan kegiatan mata pencaharian masyarakat desa ini adalah bidang pertanian. Sehingga sampai sekarang kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa belum maksimal. Dikarenakan BUMDes usaha Saprotani ini baru jalan sekitar dua tahun lebih. Sehingga pengurus maupun Pembina harus bekerja keras untuk memajukan BUMDes usaha saprotani ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya Desa Pulo Raya masih belum maksimal dijalankan karena dari hasil penelitian diketahui kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pembelian barang khususnya barang kebutuhan saprotani yang

disebabkan oleh banyak barang-barang yang tidak lengkap dijual serta masih ada masyarakat yang tidak mau ikut kerja sama dalam pengelolaan Bumdes Tunas Harapan Jaya.

2. Masih adanya ditemukan faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan Jaya Desa Puo Raya yakni kekurangan dana yang menjadi salah satu penyebab besarnya serta kurangnya pengawasan secara langsung pihak atasan bumdes untuk memeriksa secara langsung permasalahan yang terjadi terkait dengan kurang berjalannya penjualan barang di bumdes. Karena keberadaan Bumdes dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki, sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Abdul, Wahab. Ibrahim. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2008, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta; Grasindo
- Kansil dan Christina Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; Mutiara Sumberdaya
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta ; Penerbit Djambatan.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung; Refika Aditama.
- Setyawan S, Dharma, 2002. *Manajemen pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Syarifudin, Ateng, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta; Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta; Media Pressindo.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.

- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.

- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.

- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Undang-Undang

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 123 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015. Pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUMDes.